



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pekebun, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Mesjid, Dusun Baranti Wattang, RT. 001, RW. 001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Laili, Lingkungan Duampunua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 628/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M / 16 Dzulhijjah 1437 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,

Hal. 1 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/012/IX/2016, tertanggal 19 September 2016

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 hari dikediaman orangtua Termohon di Jalan Laili, Lingkungan Duampunua, Kelurahan Duampunua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak memiliki anak

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak akhir bulan September tahun 2016 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Termohon sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon hingga luka dan Termohon memiliki sifat yang keras kepala
2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon / tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak dapat mengurus keperluan Pemohon dan tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik

4. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya orangtua Pemohon dan Termohon untuk berusaha merukunkan kembali namun Termohon tidak ada itikad baik untuk itu

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;
 - Fotokopi Buku Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/012/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, I Kami binti La Baba, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah Anak kandung Saksi Pertama
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah atau emosi

Hal. 3 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon hingga luka dan Termohon memiliki sifat yang keras kepala, Termohon kurang Memperdulikan Pemohon dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak dapat mengurus keperluan Pemohon dan tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik

- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016.

Saksi kedua, Mariyana binti Bahar, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah Sepupu Saksi Kedua
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon hingga luka dan Termohon memiliki sifat yang keras kepala, Termohon kurang memperhatikan Pemohon / tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak dapat mengurus keperluan Pemohon dan tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahannya pemohon dan termohon sejak September 2016.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 5 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon hingga luka dan Termohon memiliki sifat yang keras kepala, Termohon kurang memperhatikan Pemohon / tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak dapat mengurus keperluan Pemohon dan tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal dirumahnya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri, Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak September 2016, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Hal. 6 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

Hal. 7 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 M, bertepatan tanggal 4 Muharram 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	471.000,00

Hal. 8 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.628/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)